

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert, dan Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, Johan. 2006. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, Hal. 180 – 198.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Dewi, Indah Mustika. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erlina. 2008. *Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan: Peranan Partisipasi Masyarakat Di Sumatera Utara*. Jurnal Wawasan, Volume 13, Nomor 3, Hal 164 – 172.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim A, Bunga Rampai. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Ichsan, M.Ratih, 1997. *Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD*, Malang, Brawijaya Universty Pers.
- Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Kusumawati, Prتامawati, dan Rudiyanto. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.
- Mutia, Yesi Basri, 2008. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 1, Hal. 29 – 39.
- Pramita dan Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. SNA XIII. Purwokerto.
- Republik Indonesia, (2001) *Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, (2003), *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, (2004), *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, (2005), *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, (2006) *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rudiyanto, Dedy. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santosa, Singgih. 2002. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Sopannah. 2009. *Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*. SNA XII. Palembang.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Utomo, Hari. 2011. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Werimon, Simson. 2005. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Di Provinsi Papua)*. Tesis. Program Pascasarjana Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Witono, Banu. 2003. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 2, No. 2, Hal. 151–168.
- Yudono, Bambang. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela.3.htm>.
- Zainuddin Karim, Abdul Gaffar (2002) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.